



RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN

Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Cimahi

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) ini dengan baik. Renja Perubahan ini disusun sebagai upaya untuk menjawab tantangan dan dinamika perubahan lingkungan strategis, serta sebagai langkah konkret dalam mendukung tercapainya visi dan misi organisasi.

Dalam penyusunan Renja Perubahan ini, kami mengacu pada berbagai peraturan dan pedoman yang berlaku, serta memperhatikan berbagai masukan dari pemangku kepentingan. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi seluruh jajaran organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renja Perubahan ini tidak akan terwujud tanpa dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan dukungannya dalam proses penyusunan dokumen ini.

Kami berharap Renja Perubahan ini dapat memberikan arah yang jelas dan terukur bagi organisasi dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan, serta dapat menjadi acuan dalam melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1. Latar Belakang 1

 1.2. Dasar Hukum Penyusunan 2

 1.3. Maksud dan Tujuan 6

 1.4. Sistematika Penulisan 7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 9

 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024 9

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 48

 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 53

 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 54

 3.3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan dalam Perubahan..... 57

BAB IV PENUTUP..... 65

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2023-2026 serta mempertimbangkan perubahan-perubahan yang terjadi baik pada aspek lingkungan maupun kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Cimahi.

Penyusunan Renja mengikuti tata cara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pada tanggal 22 Desember 2021 telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi. Dengan diberlakukannya peraturan Daerah tersebut yang awalnya Dinas Komunikasi, Informatika, Kerasipan dan Perputakaan Kota Cimahi berubah menjadi dua dinas yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Arsip Daerah. Dalam Pasal 6 ayat 2 huruf p disebutkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan dinas dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik. Dengan perubahan tersebut maka harus disusun rencana kerja sebagai landasan pelaksanaan bagi program dan kegiatan yang dilaksana oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi Kota Cimahi Tahun 2023-2026 fokus dan tema pembangunan Kota Cimahi di Tahun 2024 adalah Pemantapan Stabilitas Perekonomian dan peningkatan Sumber Daya Manusia.

Melalui Rencana Kerja Perubahan ini diharapkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi dapat memberikan dukungan terhadap pencapaian visi misi Kota Cimahi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah mengganti Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

- dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Nomor 6856);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembar Negara Nomor 6323);
 14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

16. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
17. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang TataCara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
19. Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur PerencanaanPembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1402);
24. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);

27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1334);
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335);
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 1);
32. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 35);
33. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2006 Nomor 58 Seri D);
34. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);
35. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 160);

36. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 287); dan
37. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 Nomor 659, Tambahan Berita Daerah Nomor 139).

1.3. Maksud dan Tujuan

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2024 dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar bidang urusan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah, juga sebagai pedoman dalam tahapan penganggaran, mulai dari penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, serta Rancangan Perubahan APBD Kota Cimahi dalam penyempurnaan rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2024.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 adalah :

1. Mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Kota Cimahi, terutama program-program prioritas pada tahun 2024;
2. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang lebih efektif dan efisien;
4. Pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kota Cimahi Tahun Anggaran 2024 serta Rancangan Perubahan APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2024.

1.4. Dasar Pertimbangan Perubahan

Dasar pertimbangan perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Terdapat target indikator yang sudah tidak relevan karena capaian kinerja terlampaui di Tahun 2023, sehingga perlu dilakukan penyesuaian target indikator berdasarkan hasil Reviu Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika.
2. Terdapat kebijakan anggaran tingkat Kota Cimahi dengan mengurangi pos belanja tertentu untuk dialihkan menjadi program prioritas lainnya, sehingga pengurangan anggaran ini harus dilakukan penyesuaian melalui Renja Perubahan.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Cimahi tahun 2024 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.1. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.3. Maksud dan Tujuan,

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Memuat Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

Mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.3. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

BAB IV PENUTUP

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan Rencana tindak lanjut.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Secara umum hasil evaluasi pelaksanaan renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 baik Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan telah menacapai target sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kota Cimahi

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)/2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)/2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)/2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)/2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)/2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)/2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	16				URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,6		3	4,02	134%	3,2	4,02	112%
						Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Persen	92%		80%	90,48%	113%		90,48%	98%
2	16	02			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Tingkat Kematangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Nilai Indeks)	Nilai Indeks	4,90	-	2,50	4,75	190%	2,75	4,75	97%
2	16	03	2,01		Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang menggunakan sub domain cimahikota.go.id yang dikelola dan terkoneksi dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persen	90%	-	90%	96,13%	107%	90%	90%	100%
2	16	03	2,01	0003	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	77	-	75	75	100%	75	75	97%
2	16	03	2,02		Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase aplikasi yang dikelola dan tersimpan di pusat data Pemerintah Daerah	Persen	95	-	85	85	100%	90	90	95%
2	16	03	2,02	0001	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E -Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	4	-	1	1	100%	1	1	25%
2	16	03	2,02	0003	Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	1	-	1	1	100%	1	1	100%
2	16	03	2,02	0007	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit	12	-	3	3	100%	3	3	25%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)/2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)/2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)/2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)/2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)/2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)/2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	16	03	2.02	0008	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Layanan	4	-	1	1	100%	1	1	25%
2	16	03	2.02	0009	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Dokumen	4	-	1	1	100%	1	1	25%
2	16	03	2.02	0015	Sub Kegiatan Fasilitas penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitas penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Dokumen	1							
2	16	03	2.02	0016	Sub Kegiatan Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	Dokumen	1							
2	16	03	2.02	0020	Sub Kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Aplikasi	3							
2	16	03	2.02	0021	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Aplikasi	1							
2	16	03	2.02	0024	Sub Kegiatan Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Perangkat Daerah	30							
2	16	03	2.02	0027	Sub Kegiatan Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	Inovasi	15							

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)/2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)/2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)/2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)/2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)/2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)/2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	16	02		2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100%	-	60%	100%	167%	65%	65%	65%
2	16	02	2,01		Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase analisis berita yang berkonten positif		87%	-	82%	82%	100%	84%	84%	97%
2	16	02	2,01	0005	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	48	-	12	12	100%	12	12	25%
2	16	02	2,01	0006	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	48	-	12	12	100%	12	12	25%
2	16	02	2,01	0007	Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Layanan	10	-	10	10	100%	10	10	100%
2	16	02	2,01	0014	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Aktivitas	12							
2	16	02	2,01	0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan	84							
2	16	02	2,01	0023	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Konten	1000							
2	20				URUSAN STATISTIK	Indeks Pembangunan Statistik			-	2	2,53	127%			
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki ketersediaan data statistik sesuai dengan prinsip satu data	Persen	100%	-	37%	100%	270%	47%	100%	100%
2	20	02	2,01		Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan data statistik sektoral yang memenuhi standar data	Data Set	1400	-	250	830	332%	300	300	21%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)/2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)/2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)/2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)/2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)/2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)/2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	20	02	2,01	0001	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen	20	-	20	20	100%	20	20	100%
2	20	02	2,01	0002	Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Orang	270	-	45	45	100%	60	60	22%
2	20	02	2,01	0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Orang	180							
2	20	02	2,01	0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Dokumen	20							
					URUSAN PERSANDIAN	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Indeks	400	-	351	409	117%	351	351	88%
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah	Persen	100%	-	33,33%	100%	300%	50,00%	100,00%	100%
2	21	02	2,01		Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ASN yang telah menggunakan sertifikat elektronik	Persen	6	-	3	40	1333%	4	4	67%
2	21	02	2,01	0002	Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	10	-	1	1	100%	2	2	20%
2	21	02	2,01	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	30	-	15	15	100%	20	20	67%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)/2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)/2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)/2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)/2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)/2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)/2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	21	02	2.02		Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi;	Persen	30	-	10	15	150%	10	10	33%
2	21	02	2.02	0001	Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah	20	-	1	30	3000%	1	1	5%
					NON URUSAN	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		56,50	-	55	86,93	158%	55,50	86,93	154%
2	16	02			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip Pemerintah Daerah	Nilai Angka	81 (A)	-	71,00	80	113%	74,50 (BB)	80,00	88%
						Indeks Profesionalitas ASN	Nilai Angka	79,68	-	50,00	76,6	153%	50,50	76,6	96%
						Nilai IKM Perangkat Daerah	Nilai Angka	84,92	-	76,61	84,72	111%	80,61	84,72	100%
2	16	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun	Persen	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	16	01	2.01	0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	9	-	2	2	100%	2	2	22%
2	16	01	2.01	0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	64	-	16	16	100%	16	16	25%
2	16	01	2.03		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Milik Daerah;		48	-	12	12	100%	12	12	25%
2	16	01	2.03	0002	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	20	-	5	5	100%	5	5	25%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)/2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)/2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)/2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)/2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)/2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)/2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	16	01	2,06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan	48	-	12	12	100%	12	12	25%
2	16	01	2,06	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	160	-	40	40	100%	40	40	25%
2	16	01	2,06	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	60	-	15	15	100%	15	15	25%
2	16	01	2,06	0005	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	-	3	3	100%	3	3	25%
2	16	01	2,06	0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2,35	-	50	50	100%	60	50	2128%
2	16	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12							
					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		1							
2	16	01	2,08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan	48	-	12	12	100%	12	12	25%
2	16	01	2,08	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	64	-	16	16	100%	16	16	25%
2	16	01	2,08	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	64	-	16	16	100%	16	16	25%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)/2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)/2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)/2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)/2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)/2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)/2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	16	01	2,08	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	64	-	16	16	100%	16	16	25%
2	16	01	2,09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan barang milik daerah	Bulan	48	-	12	12	100%	12	12	25%
2	16	01	2,09	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	20	-	5	5	100%	5	5	25%
2	16	01	2,09	0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	-	1	1	100%	1	1	25%
2	16	01	2,09	0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	71	-	15	15	100%	15	15	21%
2	16	01	2,05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Yang terfasilitasi pelayanan administrasi kepegawaian	Persen	100	-	100	100	100%	100	100	100%
2	16	01	2,05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	37							
2	16	01	2,05	0010	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	40	-	40	40	100%	40	40	100%
2	16	01	2,05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	11							
2	16	01	2,02		Kegiatan Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Keuangan Yang Disusun;	Dokumen	48	-	12	12	100%	12	12	25%
2	16	01	2,02	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	136	-	34	34	100%	34	34	25%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)/2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)/2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)/2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)/2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)/2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)/2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	16	01	2.02	0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	72	-	18	18	100%	18	18	25%

Terdapat capaian Program pada Tahun 2023 telah melampaui target dijelaskana pada table berikut:

No	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	KETERANGAN	FAKTOR-FAKTOR PENDORONG
1	2	3	4	5	6	7
I	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Tingkat kematangan teknologi informasi dan Komunikasi (Nilai Indeks)	2,5	4,75	Melebihi target	Tingkat kematangan teknologi dan informasi tercapai melebihi target hal ini disebabkan oleh peningkatan dalam pengelolaan pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan jaringan intra, penggunaan Sistem Penghubung Layanan dan Penyediaan pusat data pemerintah Kota Cimahi.
II	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	60	100	Melebihi target	Pada tahun 2023 capaian target sebesar 100%, penyebarluasan informasi public dupayakan agar tersampaikan kepada masyarakat secara masif kepada seluruh masyarakat. Penyampaian informasi dilakukan melalui 10 kanal media. 1. Penulisan artikel pada website atau media lainnya. 2. Advertorial atau filer di TV Nasional. 3. Publikasi media radio daerah atau iklan layanan masyarakat. 4. Reportase on the spot / adevrtorialdi TV daerah Tipe. 5. Reportase on the spot / adevrtorialdi TV daerah Tipe 6. Talkshow di TV Daerah. 7. Publikasi media onlie. 8. Publikasi media cetak regional. 9. Publikasi SKH/SKM. 10. Publikasi melalui media online atau iklan display.
III	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki ketersediaan data statistik sesuai dengan prinsip satu data	37	100	Melebihi target	Seluruh Perangkat Daerah pada tahun 2023 telah memiliki ketersediaan data statistik sesuai dengan prinsip satu data. Ketersediaan data statistik sektoral yang dihasilkan oleh perangkat daerah sebagai produsen data dilaksanakan melalui portal https://opendata.cimahikota.go.id/ . Portal open data Cimahi terhubung dengan ekosistem data Jawa Barat dan dapat berbagi pakai dengan stake holder yang lain, yang telah memiliki standar

No	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	KETERANGAN	FAKTOR-FAKTOR PENDORONG
						kalitas data yang telah ditingkatkan.
IV	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah	33,33	100	Melebihi target	Penyelenggaraan urusan persandian manfaat yang ingin dicapai adalah menjamin keamanan data strategis, mendukung tatakelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kepercayaan publik pada pemerintahan dilakukan melalui layanan: 1. Fasilitasi Tanda tangan elektronik. 2. Fasilitasi Email resmi kedinasan (cimahikota.go.id). 3. Vulnerable test untuk menjamin keamanan data.
V	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip Perangkat Daerah	71	80	Melebihi Target	
		Indeks Profesionalitas ASN	50	79,48	Melebihi Target	Seluruh ASN lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi didorong untuk melaksanakan pengembangan kompetensi serta penilaian baik dari pimpinan terhadap capain kinerja menjadi pendorong meningkatnya Indeks Profesional ASN.
		Nilai IKM Perangkat Daerah	76,61	84,72	Melebihi target	Pelayanan yang diselenggarakan menerapkan perinsip-prinsip SPBE sehingga mempermudah akses masyarakat maupun perangkat daerah yang memanfaatkan layanan Diskominfo.

Faktor pendorong tercapainya seluruh target kinerja baik pada tingkat sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi adalah sebagai berikut:

- Adanya dasar hukum yang jelas sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagai pedoman.
- Adanya keterlibatan serta komitmen pimpinan secara berjenjang dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

2.2. Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.

Tabel 2.12. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi

No	Indikator	SPM/Sta ndar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi			
				2023	2024	2025	2026	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	-	-	3,00	3,20	3,40	3,60	3,09	4,02	3,00	3,20	3,40	3,60
2	Indeks Keterbukaan Infromasi Publik	-	-	80%	84%	88%	92%	73	90,48	80%	84%	88%	92%
3	Indeks Pembangunan Statistik	-	-	2,00	3,00	3,00	4,00	N/A	2,53	2,00	3,00	3,00	4,00
4	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	-	-	351	370	390	400	386	409	351	370	390	400
5	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	-	55,00	55,50	56,00	56,50	78,71	86,93	55,00	55,50	56,00	56,50

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat kesiapan dan kinerja pemerintah dalam menerapkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam proses pemerintahan. Ini adalah alat yang digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah telah bergerak menuju transformasi digital dalam menyelenggarakan layanan publik, mengelola data, dan berkomunikasi dengan masyarakat.

SPBE bertujuan untuk mendorong pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas layanan kepada masyarakat melalui penggunaan TIK.

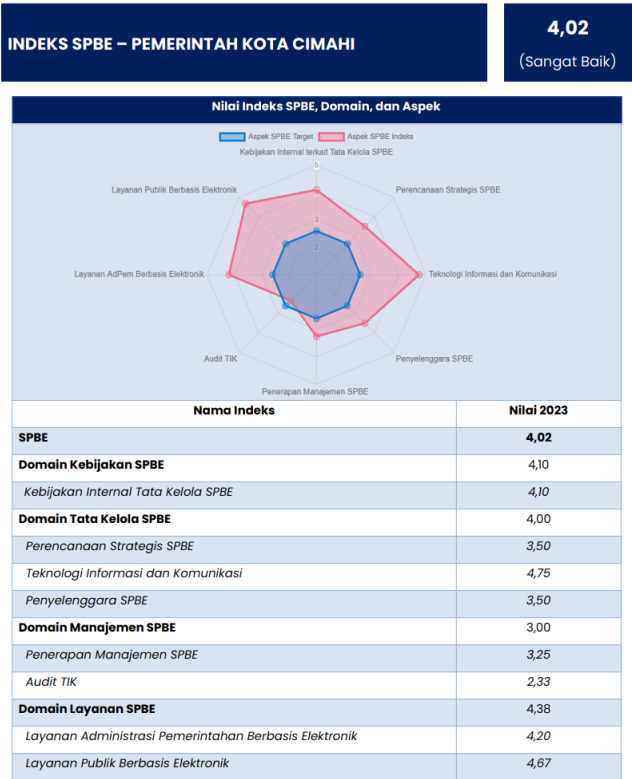
Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal.

Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2023, telah dilaksanakan Pemantauan SPBE

dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasi. Indeks SPBE pada tahun 2023 ditargetkan ditargetkan sebesar 3,00. Berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi capaian SPBE Kota Cimahi sebesar 4,02 dengan predikat sangat baik, sehingga tingkat capaian kinerja sasaran Meningkatnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada tahun 2023 sudah melebihi harapan/target yaitu sebesar 134% (sangat baik).

Berdasarkan laporan Hasil Evaluasi SPBE Kota Cimahi Tahun 2023, raihan dan kurva indeks SPBE Pemerintah Kota Cimahi adalah seperti yang ditunjukkan pada Gambar sebagai berikut :



Gambar 2.1 Indeks SPBE Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2023

Hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE yang dilakukan pada tahun 2023 ini diharapkan dapat digunakan dalam menentukan tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara

menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi nasional.

Indeks Keterbukaan Informasi Publik alat yang digunakan untuk mengukur tingkat keterbukaan dan transparansi informasi publik yang disediakan oleh pemerintah. Indeks ini dirancang untuk memberikan gambaran tentang sejauh mana pemerintah mengungkapkan data, informasi, dan kebijakan kepada masyarakat, bisnis, atau pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang Indeks Keterbukaan Informasi Publik.

Keterbukaan informasi publik merujuk pada praktik pemerintah yang mengutamakan akses terbuka dan bebas terhadap data, dokumen, dan informasi yang relevan bagi masyarakat umum. Ini mencakup data kebijakan, data anggaran, data administratif, dan informasi lainnya yang relevan dengan tindakan dan keputusan pemerintah yang memiliki kriteria sebagai dokumen atau informasi publik. Pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik untuk mengukur tingkat keterbukaan pemerintah dan transparansi dalam memberikan informasi kepada masyarakat, mendorong pemerintah untuk meningkatkan implementasi keterbukaan informasi publik.

Keterbukaan informasi publik pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 80, berdasarkan hasil monitoring, evaluasi dan peringkat penerapan keterbukaan informasi publik pada Badan Publik di Jawa Barat Tahun 2023 sebesar 90,48 dengan kualifikasi Informatif. Capaian kinerja sasaran Meningkatnya penyelenggaraan implementasi keterbukaan informasi publik mencapai 113,10% sehingga capaian kinerja Indeks keterbukaan Informasi Publik tercapai melebihi harapan dengan predikat sangat baik.

Indeks Pembangunan Statistik merupakan alat yang digunakan untuk mengukur perkembangan dan kinerja sektor statistik. Ini adalah indikator yang digunakan untuk menilai kemajuan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyebaran data statistik, yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, pengambilan keputusan, dan pemantauan progres pembangunan nasional. Berikut penjelasan lebih lanjut tentang Indeks Pembangunan Statistik di Indonesia:

Indeks Pembangunan Statistik mencakup aspek:

1. Kualitas data, yaitu keakuratan dan kualitas data statistik yang dihasilkan.
2. Pengolahan data, yaitu kemampuan lembaga statistik dalam mengolah data secara efisien dan handal.
3. Analisis, kemampuan dalam melakukan analisis data yang mendalam.
4. Diseminasi data, sejauh mana data statistik disebarkan secara luas dan mudah diakses oleh masyarakat dan pemangku kepentingan.
5. Sumber daya manusia menilai kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam statistik.

Keluaran EPSS adalah Indeks Pembangunan Statistik (IPS), yaitu suatu indikator yang menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di masing-masing instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik sektoral.

Target IPS pada tahun 2023 sebesar 2,00 dan berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik sebesar 2,53 dengan kategori Cukup sehingga capaian indikator sebesar 126,50% (sangat baik) melebihi harapan.

Indeks Keamanan Informasi (KAMI) adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat keamanan informasi dalam suatu organisasi atau lingkungan kerja. Indeks ini bertujuan untuk menilai sejauh mana organisasi telah melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi data dan informasi penting mereka dari ancaman keamanan, termasuk peretasan, kehilangan data, dan pelanggaran keamanan.

Tujuan pengukuran ini adalah untuk menilai dan memantau tingkat kesiapan dan efektifitas kebijakan, prosedur, dan kontrol keamanan informasi dan dirancang untuk membantu organisasi memahami risiko keamanan informasi dan untuk meningkatkan tingkat perlindungan yang ada.

Sasaran meningkatnya keamanan sistem informasi pemerintah daerah diukur menggunakan indikator Indeks Keamanan Informasi (KAMI). Indeks (KAMI) merupakan alat untuk menganalisa tingkat kesiapan

pengamanan informasi di suatu organisasi. Alat evaluasi ini tidak ditujukan untuk menganalisa kelayakan atau efektifitas bentuk pengamanan yang ada, melainkan sebagai perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan (kelengkapan dan kematangan) kerangka kerja keamanan informasi kepada pimpinan instansi. Evaluasi dilakukan terhadap sebagai berbagai area yang menjadi target penerapan kewananan informasi dengan ruang lingkup pembahasan yang juga memnuhi semua aspek kewananan yang didefinisikan oleh standar ISO/IEC 27001:2013.

Pada Tahun 2023 Indeks KAMI yang ditargetkan adalah 351 dan hasil penilaian yang telah dilakukan sebesar 409 dengan demikian capaian sasaran meningkatnya keamanan sistem informasi pemerintah daerah tercapai melampaui target sebesar 116,52% (sangat baik).

Indeks Reformasi Birokrasi adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan dan efektivitas reformasi birokrasi dalam suatu pemerintahan. Reformasi birokrasi adalah serangkaian langkah dan upaya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas layanan yang diberikan oleh lembaga-lembaga pemerintah. Indeks ini dirancang untuk mengevaluasi sejauh mana pemerintah telah berhasil mengimplementasikan reformasi birokrasi.

RB menjadi salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan. Arahannya Presiden tentang RB berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*). Arahannya Presiden tersebut dapat terwujud apabila ada upaya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan yang menyentuh akar permasalahan, tidak hanya menjadi agenda rutin tanpa memberikan daya ungkit yang konkret.

Penilaian Indeks RB Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2023 sampai dengan penyusunan LKIP ini belum diperoleh hasil oleh karena itu pengukuran kinerja menggunakan hasil tahun 2022 sebesar 78,71, maka capaian kinerja tercapai melebihi harapan dengan capaian sebesar 143,11% (sangat baik).

Analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi, sebagai berikut :

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi melaksanakan 3 urusan yang menjadi kewenangan yaitu Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Persandian, dan Urusan Statistik. Pelayanan yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis layanan, yaitu:

a. Layanan Publik Secara Langsung

Terdiri dari : Layanan Pengaduan Masyarakat, Layanan Informasi, Layanan Publikasi

b. Layanan Publik Secara Tidak Langsung

Terdiri dari : Layanan Data Statistik, Layanan Publikasi, Layanan Dokumentasi, Layanan Aplikasi TIK, Layanan Infrastruktur Jaringan TIK, Layanan Persandian.

Kinerja masing-masing layanan tersebut didukung oleh beberapa aspek kinerja, sehingga untuk mengevaluasi kinerja layanan tersebut dilakukan analisa terhadap capaian indikator masing-masing aspeknya. Capaian kinerja layanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi sebagai berikut:

A. Layanan Publik Secara Langsung

a. Layanan Pengaduan Masyarakat

Layanan Pengaduan Masyarakat dilakukan melalui aplikasi PESDUK (Pesan Penduduk), layanan surat baik elektronik maupun fisik, pengaduan langsung dan pengaduan melalui media massa. Secara umum layanan Pengaduan Masyarakat cukup baik karena hampir semua pengaduan selalu direspon oleh pengelola. Namun kendala yang dihadapi dalam layanan ini adalah pada tindak lanjut terhadap masalah yang disampaikan oleh masyarakat yaitu tidak terkontrolnya penanganan permasalahan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Selain itu layanan Pengaduan Masyarakat belum terintegrasi dengan instansi/lembaga Pemerintah instansi vertikal antara lain kepolisian, BPN, Kementerian Agama, BPS.

b. Layanan Informasi

Layanan Informasi, secara fisik telah mengalami peningkatan dengan dilaksanakannya renovasi loket pelayanan. Layanan ini didukung oleh Tim PPID Kota Cimahi yang terdiri dari PPID Utama yaitu Kepala Bidang IKPS Dinas Komunikasi dan Informatika dan PPID Pembantu yaitu Sekretaris Perangkat Daerah Kota Cimahi. Kendala yang dihadapi dalam layanan ini adalah:

1. Belum adanya SOP untuk melakukan Uji Konsekuensi Informasi pada PPID Kota Cimahi
2. Pengetahuan terkait Keberatan Informasi dan Sengketa Informasi yang dirasa masih kurang pada PPID Pembantu di tiap Perangkat Daerah.
3. Belum terbentuknya KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) Kota Cimahi. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) adalah kelompok yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat, dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah.
4. Informasi pada website Pemerintah Kota Cimahi kurang *ter-update*

c. Layanan Publikasi

Layanan Publikasi dilaksanakan melalui media sosial dan kerjasama dengan media massa. Layanan publikasi melalui media sosial terdapat 2 yaitu Facebook dan Instagram. Publikasi melalui media sosial meliputi publikasi kegiatan-kegiatan Kepala Daerah, capaian-capaian pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan serta program-program prioritas. Sedangkan publikasi melalui media massa meliputi berbagai media koran/majalah, media *online*, media radio dan media televisi. Publikasi melalui media massa meliputi kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah Kota Cimahi. *Pers release* dilakukan untuk program-program prioritas Pemerintah Kota Cimahi.

Kendala yang dihadapi dalam layanan publikasi, sebagai berikut:

1. Publikasi melalui media sosial mempunyai kecenderungan terfokus pada aktivitas Kepala Daerah dan kurang didukung oleh narasi tentang pembangunan.

2. Publikasi melalui media sosial kurang mendapat respon dari masyarakat karena kecenderungan komunikasi yang dilakukan hanya satu arah yaitu respon dari masyarakat tidak diberikan tanggapan karena tidak didukung dengan tim melainkan hanya dilaksanakan oleh operator.
3. Tidak ada *feedback* dari analisis berita yang dilakukan sebagai bahan penyusunan perencanaan publikasi.

B. Layanan Publik Secara Tidak Langsung

a. Layanan Data Statistik

Untuk Layanan Data Statistik, pada tahun 2017 telah dibangun aplikasi OPEN DATA sebagai sarana publikasi data statistik sektoral Pemerintah Kota Cimahi. Sebagai Wali Data, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi mempunyai tugas memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; menyebarluaskan Data dan Metadata; dan membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah. Kendala yang dihadapi dalam layanan Data Statistik adalah:

1. Belum optimalnya penyelenggaraan statistik sektoral antara “Bappeda dengan Diskominfo;
2. Pengelola Data pada PD dibebani pekerjaan pengumpulan data dari berbagai instansi (Bappeda, Setda, Kominfo, Instansi Vertikal) sehingga tidak fokus;
3. Pemahaman tentang statistik sektoral masih rendah dan masih terbatasnya SDM yang berlatar belakang pendidikan Statistik, kemampuan analisis dan grafis;
4. Penggunaan *Platform* yang berbeda pada aplikasi yang dibangun perangkat daerah sehingga menghambat proses integrasi.

b. Layanan Dokumentasi

Layanan Dokumentasi dilakukan hanya kegiatan pimpinan kepala daerah.

c. Layanan Aplikasi TIK

Layanan Aplikasi TIK meliputi layanan domain dan subdomain, pengelolaan/kontrol aplikasi-aplikasi PD, pendampingan pembangunan aplikasi PD dan integrasi aplikasi-aplikasi PD.

d. Layanan Infrastruktur Jaringan TIK

Seluruh Perangkat Daerah di lingkup perkantoran Pemkot Cimahi telah tersambung dengan sambungan intranet. Sedangkan yang di luar lingkup perkantoran Pemkot Cimahi menggunakan jaringan *Fiber Optic*. Belum seluruhnya kantor layanan tersambung dengan *fiber optic* melainkan menggunakan saluran VPN. Kendala dalam layanan infrastruktur jaringan TIK yaitu:

1. Pusat Data/Data Centre belum memadai dan bercampur dengan ruang kerja administrasi.
2. Penggelaran Jaringan *Fiber Optic* belum menyeluruh sesuai dengan perencanaan.
3. Implementasi dan Optimalisasi Jaringan CCTV untuk kepentingan implementasi *Smart City* belum dilakukan.
4. Belum lengkapnya perangkat pendukung kinerja jaringan baik perangkat keras maupun perangkat lunak serta perangkat pengamanan jaringan di dalamnya.
5. Adanya ancaman akan keamanan jaringan yang terus meningkat yang harus segera diantisipasi segera.
6. Belum tersediannya kebijakan, standard dan prosedur.

e. Layanan Persandian

Layanan persandian meliputi layanan keamanan informasi, sertifikasi elektronik dan layanan persandian. Kendala yang dihadapi dalam layanan persandian adalah:

1. Kategori Sistem Elektronik tinggi yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi membutuhkan minimal tingkat kematangan tata kelola yang Terdefinisi dan Konsisten (tingkat III) dengan kelengkapan control keamanan yang cukup lengkap. Mengacu pada hasil penilaian mandiri dengan menggunakan instrument Indeks KAMI, tingkat kematangan tata kelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi baru ditingkat Penerapan Kerangka Kerja Dasar

(tingkat II) dengan kelengkapan kontrol keamanan yang perlu perbaiki

2. Belum adanya dokumen perencanaan strategis persandian dan keamanan informasi yang menjadi pedoman penyelenggaraan program/kegiatan bidang persandian dan keamanan informasi
3. Belum ada proses penilaian kinerja keamanan informasi untuk mengukur tingkat ketercapaiannya terhadap sasaran keamanan informasi
4. Kebijakan tata kelola keamanan informasi sudah ada, namun masih belum disesuaikan dengan regulasi maupun standar yang terbaru
5. SOP keamanan informasi yang ada saat ini belum memenuhi semua kebutuhan organisasi, dan masih mengacu pada regulasi maupun standar lama
6. Kurang optimalnya layanan persandian dan keamanan informasi karena belum tersediaannya sarana dan prasarana pendukung
7. *Security*, Keamanan Aplikasi yang telah dibangun, Keamanan Akses Jaringan Internet maupun Intranet dan ketersediaan Standar Teknis Penerapan Aplikasi disetiap SKPD;

Pada Tahun Anggaran 2023 kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi secara umum rata melebihi target dengan rata-rata capaian sebesar 126,65%. Pencapaian Kinerja ini dicapai dengan komitmen bersama yang kuat dan kerja keras seluruh elemen organisasi dari mulai pucuk pimpinan hingga lapisan paling bawah.

Dengan lompatan capaian kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2023 dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian terget pada tahun perencanaan 2025. Penyesuaian target untuk rencan kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi dilakukan dengan telaahan dan analisis terlebih dahulu melalui reviu Rencana Strategis Tahun 2023-2036. Penyesuaian target dilakukan terhadap Indikator Kinerja Kunci dan Program sebagai berikut:

Hasil evaluasi terhadap capaian kinerja sasaran IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 dan rekomendasi dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Tahun 2023 terdapat

beberapa capaian yang melampaui target bahkan melebihi target rencana tahun 2025, indikator kinerja utama yang telah melampaui target sebagai berikut:

Tabel 2.13. Perbandingan Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran							
				Pada Tahun Ke							
				2023		2024		2025		2026	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3.00	4,02	3.20		3.40		3.60	
2	Meningkatkan penyelenggaraan implementasi keterbukaan informasi publik	Meningkatnya penyelenggaraan implementasi keterbukaan informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	80%	90,48%	84%		88%		90%	
3	Mewujudkan data statistik sektoral daerah yang berkualitas	Terwujudnya data statistik sektoral daerah yang berkualitas	Indeks Pembangunan Statistik	2	2,53	3		3		4	
4	Meningkatkan keamanan sistem informasi pemerintah daerah	Meningkatnya keamanan sistem informasi pemerintah daerah	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	351	409	370		390		400	
5	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	55	78,71	55,5		56		56,5	

Berdasarkan capaian tersebut, maka perlu dilakukan penyesuain rencana target untuk tahun anggaran 2024 s.d. 2026 sebagai berikut:

Tabel 2.14 Perubahan Terget Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran							
				Pada Tahun Ke							
				2023		2024		2025		2026	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Meningkatkan Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3.00	4,02	4,10		4.15		4,2	
			Indeks Keterbukaan Informasi Publik	80%	90,48%	90,75%		90,90%		91,00%	
			Indeks Pembangunan Statistik	2	2,53	3		3,01		3,10	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran							
				Pada Tahun Ke							
				2023		2024		2025		2026	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
			Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	351	409	410		412		415	
			Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	55	86,93	86,96		86,98		89,00	

Selain perubahan IKU diskominfo, terdapat beberapa kinerja Program yang telah melampaui target pada tahun 2023 sehingga dilakukan penyesuaian target sebagai berikut:

Tabel 2.15 Perubahan Terget Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi

No	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET			
				2023	2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7
I	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatkan penyelenggaraan e-Government	Tingkat kematangan teknologi informasi dan Komunikasi (Nilai Indeks)	2,5	4,75	4,80	4,90
II	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatnya penyebaran informasi pembangunan daerah dan komunikasi publik yang efektif dan efisien	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	60	100	100	100
III	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Meningkatnya tata Kelola statistik sektoral daerah	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki ketersediaan data statistik sesuai dengan prinsip satu data	37	100	100	100

No	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET			
IV	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah	33,33	100	100	100
V	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kinerja Organisasi	Nilai Sakip Perangkat Daerah	71	74,5	78	80
			Indeks Profesionalitas ASN	50	79,48	79,58	79,68
			Nilai IKM Perangkat Daerah	76,61	84,72	84,82	84,92

2.3. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Prioritas pembangunan Kota Cimahi pada tahun 2024 disusun berdasarkan beberapa hal yang menjadi mandat untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Cimahi, baik itu program dukungan terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional dan provinsi serta terhadap target global dan nasional lainnya seperti SDG’s dan SPM. Permasalahan dan isu strategis juga menjadi hal yang menjadi dasar penentuan prioritas pembangunan Kota Cimahi pada Tahun 2024.

Sehingga fokus pembangunan daerah diberikan perhatian khusus pada:

1. Optimalisasi tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*);
2. Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2024 dan kebijakan Nasional melalui RPJMN;
3. Prioritas pembangunan Provinsi Jawa barat dalam RKPD Provinsi Jawa barat tahun 2024; dan
4. Pencapaian Indikator Kinerja Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026.

Berdasarkan permasalahan, isu strategis dan tema pembangunan Kota Cimahi maka disusun prioritas pembangunan Kota Cimahi tahun 2024 sebagai berikut:

1. Penguatan kualitas pelayanan kesehatan;
2. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan;
3. Peningkatan aksesibilitas perlindungan dan pelayanan sosial;
4. Peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan pemberdayaan masyarakat berbasis gender;
5. Peningkatan sumber daya olahraga, daya saing pemuda dan pelaku budaya;
6. Peningkatan kapasitas dalam penanggulangan bencana;
7. Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
8. Peningkatan iklim investasi;
9. Peningkatan daya beli masyarakat;
10. Peningkatan daya saing pelaku usaha ekonomi dan produk lokal;
11. Menjaga ketahanan pangan daerah;
12. Penyerapan tenaga kerja;
13. Pengembangan dan peningkatan aksesibilitas kawasan strategis kota;
14. Pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar, perumahan, dan awasan permukiman;
15. Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi pelayanan publik; dan
16. Fasilitasi pemilihan umum serentak.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi melaksanakan urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik diharapkan mampu mendukung pencapaian Visi dan Misi Wali Kota Cimahi sesuai dengan Tema Pembangunan Kota Cimahi Tahun 2024 Pemantapan Stabilitas Perekonomian dan peningkatan Sumber Daya Manusia”. Selain mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota diharapkan Dinas Komunikasi dan Informatika mampu berkontribusi dalam mewujudkan 14 (empat belas) Prioritas Pembangunan Daerah Kota Cimahi ke 15 yaitu Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi pelayanan publik.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi sampai dengan Trwiiwulan II Tahun 2024

dilakukan untuk mengetahui kemampuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Alokasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 sebesar Rp. 15.861.391.470 dan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 6.144.486.482 (38,73%). Secara umum capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi sampai dengan Triwulan II sesuai dengan rencana, capaian kinerja keuangan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp. 3.013.220.964 (43,14%), realisasi Program Informasi Dan Komunikasi Publik Rp. 1.240.678.492 (31,87%), realisasi Program Aplikasi Informatika Rp. 1.391.254.840 (36,36%), realisasi Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Rp. 343.148.250 (54,60%), Realisasi Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Rp. 156.183.936 (29,56%). Secara umum pelaksanaan program kegiatan yang telah dilaksanakan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi sudah cukup baik dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, adapun terdapat beberapa kegiatan yang realisasinya masih rendah disebabkan masih dilakukan proses administrasi yang masih berjalan dalam tahap pencairan anggaran.

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 Kota Cimahi sampai dengan triwulan II secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel . 2.1. Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota Cimahi
Periode Pelaksanaan: 2024
Triwulan: 2

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Kota sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Kota sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kota Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun ...)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun (%)	
									I		II		III		IV									
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14												
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																							
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																							
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84	28.909.231.424,00	80	6.335.677.066	74,50 (BB)	6.986.244.670	0	1.406.396.197	0	1.873.271.591					0	3.279.667.788	0.00	0.00	74	10.265.912.458	18,5	2.566.478.115
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN	51,50		76,6		50,50	6.986.244.670	0	1.406.396.197	0	1.873.271.591					0	3.279.667.788	0.00	46.94	50	10.265.912.458	12,5	2.566.478.115
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah	88,31		84,72		80,61	6.986.244.670	0	1.406.396.197	0	1.873.271.591					0	3.279.667.788	0.00	46.94	80	10.265.912.458	20	2.566.478.115
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun	100%	282361000	100%	43.383.840	100	125.402.000	50	44.208.200	0	21.533.050					50	65.741.250	50.00	52.42	150	191.143.250	37,5	47.785.813
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	79336000	2	23.559.840	2	73.935.000	1	41.436.200	0	590.350					1	42.026.550	50.00	56.84	3	115.961.550	0,75	28.990.388
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16	203025000	16	19.824.000	16	51.467.000	4	2.772.000	4	20.942.700					8	23.714.700	50.00	46.08	24	75.181.700	6	18.795.425
															Rata- Rata Capaian			87.50	57.01					

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Kota sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Kota sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kota Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun ...)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun (%)	
									I		II		III		IV									
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14											
													Sub Kegiatan:											
													Predikat Capaian Sub Kegiatan:			Tinggi	Rendah							
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan Yang Disusun	12	26567765223	12	5.441.247.760	12	5.810.878.290	3	1.198.462.211	3	1.622.405.112				6	2.820.867.323	50.00	48.54	18	8.631.745.613	4,5	2.157.936.403	
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34	26426977223	34	5.425.339.060	34	5.790.106.290	30	1.194.806.511	34	1.620.725.112				64	2.815.531.623	188.24	48.63	98	8.605.637.913	24,5	2.151.409.478	
2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	18	140788000	18	15.908.700	18	20.772.000	4	3.655.700	4	1.680.000				8	5.335.700	44.44	25.69	26	26.107.700	6,5	6.526.925	
													Rata- Rata Capaian Sub Kegiatan:			180.23	52.07							
													Predikat Capaian Sub Kegiatan:			Sangat Tinggi	Rendah							
2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Milik Daerah	12	68.040.960	12	15.409.895	12	20.942.180	3	460.400	3	5.420.000				6	5.880.400	50.00	28.08	18	26.822.580	4,5	6.705.645	
2.16.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5	68.040.960	5	15.409.895	5	20.942.180	1	460.400	2	5.420.000				3	5.880.400	60.00	28.08	8	26.822.580	2	6.705.645	
													Rata- Rata Capaian Sub Kegiatan:			100.00	98.80							
													Predikat Capaian Sub Kegiatan:			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Kota sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Kota sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kota Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun ...)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun (%)	
									I		II		III		IV									
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14											
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Yang terfasilitasi pelayanan administrasi kepegawaian	100	33.629.440	100	83.947.000	100	31.010.000	100	10.300.000	0	17.910.000					100	28.210.000	100.00	90.97	200	59.220.000	50	14.805.000
2.16.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	40	33.629.440	40	83.947.000	40	31.010.000	40	10.300.000	0	17.910.000					40	28.210.000	100.00	90.97	80	59.220.000	20	14.805.000
															Rata- Rata Capaian Sub Kegiatan:			100.00	90.97					
															Predikat Capaian Sub Kegiatan:			Sangat Tinggi	Sangat Rendah					
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12	1115724881	12	372.322.093	12	294.141.000	3	44.460.500	3	75.310.909					6	119.771.409	50.00	40.72	18	413.912.409	4,5	103.478.102
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40	81979872	40	146.981.000	3	63.382.000	1	16.081.500	0	0					1	16.081.500	33.33	25.37	4	79.463.500	1	19.865.875
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15	60450840	15	35.364.200	40	39.374.000	10	4.890.000	10	13.256.000					20	18.146.000	50.00	46.09	60	57.520.000	15	14.380.000
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	289173600	3	16.394.650	15	16.526.000	4	1.689.000	3	9.898.500					7	11.587.500	46.67	70.12	22	28.113.500	5,5	7.028.375
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	684120569	50	173.582.243	60	174.859.000	15	21.800.000	15	52.156.409					30	73.956.409	50.00	42.29	90	248.815.409	22,5	62.203.852

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Kota sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Kota sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kota Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun ...)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun (%)	
									I		II		III		IV									
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		
														Rata- Rata Capaian Sub Kegiatan:			107.92	65.18						
														Predikat Capaian Sub Kegiatan:			Sangat Tinggi	Sangat Rendah						
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12	355343320	12	83.808.447	12	154.191.000	3	14.386.886	3	78.533.720				6	92.920.606	50.00	60.26	18	247.111.606	4,5	61.777.902	
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16	160416400	16	39.007.352	16	91.180.000	4	6.480.576	4	62.290.705				8	68.771.281	50.00	75.42	24	159.951.281	6	39.987.820	
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	16	14859520	16	627.251	16	3.800.000	4	103.734	4	607.863				8	711.597	50.00	18.73	24	4.511.597	6	1.127.899	
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16	180067400	16	44.173.844	16	59.211.000	4	7.802.576	4	15.635.152				8	23.437.728	50.00	39.58	24	82.648.728	6	20.662.182	
														Rata- Rata Capaian Sub Kegiatan:			75.00	59.96						
														Predikat Capaian Sub Kegiatan:			Sedang	Rendah						
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan barang milik daerah	12	486366600	12	295.558.031	12	549.680.200	3	94.118.000	3	52.158.800				6	146.276.800	50.00	26.61	18	695.957.000	4,5	173.989.250	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Kota sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Kota sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kota Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun ...)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun (%)	
									I		II		III		IV									
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14											
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	192119600	5	108.506.600	5	150.148.000	2	22.428.000	0	52.158.800					2	74.586.800	40.00	49.68	7	224.734.800	1,75	56.183.700
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	215882000	1	162.933.431	1	381.572.200	0	54.925.000	0	0					0	54.925.000	0.00	14.39	1	436.497.200	0,25	109.124.300
2.16.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15	78365000	15	24.118.000	18	17.960.000	4	16.765.000	17	0					21	16.765.000	116.67	93.35	39	34.725.000	9,75	8.681.250
															Rata- Rata Capaian Sub Kegiatan:			105.56	88.63					
															Predikat Capaian Sub Kegiatan:			Sangat Tinggi	Tinggi					
															Rata- Rata Capaian Kegiatan:			96.43	79.45					
															Predikat Capaian Kegiatan:			Sangat Tinggi	Tinggi					

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Kota sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Kota sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kota Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun ...)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun (%)		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			4		5		6		7		8		9		10			11		12		13		14
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	60%	8178721312	100%	2.159.908.910	65	3.892.343.550	0	411.430.609	0	961.220.244					0	1.372.650.853	0.00	35.27	65	5.264.994.403	16,25	1.316.248.601
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase analisis berita yang berkonten positif	82%	8178721312	82%	2.159.908.910	84	3.892.343.550	0	411.430.609	92,57	961.220.244					92,57	1.372.650.853	110.20	35.27	176,57	5.264.994.403	44,143	1.316.248.601
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12	945944528	12	159.238.099	12	229.223.850	3	25.703.500	3	44.824.500					6	70.528.000	50.00	30.77	18	299.751.850	4,5	74.937.963
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12	476912384	12	131.226.093	12	856.335.000	3	28.027.961	3	263.282.548					6	291.310.509	50.00	34.02	18	1.147.645.509	4,5	286.911.377
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	10	6755864400	10	1.869.444.718	10	2.806.784.700	10	357.699.148	10	653.113.196					20	1.010.812.344	200.00	36.01	30	3.817.597.044	7,5	954.399.261
															Rata- Rata Capaian Sub Kegiatan:			150.00	54.36					
															Predikat Capaian Sub Kegiatan:			Sangat Tinggi	Rendah					
															Rata- Rata Capaian Kegiatan:			228.02	56.99					
															Predikat Capaian Kegiatan:			Sangat Tinggi	Rendah					

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Kota sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Kota sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kota Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun ...)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV									
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
									2	3	4		5		6		7		8		9	10		11
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Tingkat Kematangan Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,50	13248214208	4,75	2.968.791.766	2,75	3.825.849.000	0	518.707.455	0	980.482.859					0	1.499.190.314	0.00	39.19	2	5.325.039.314	0,5	1.331.259.829
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang menggunakan sub domain cimahikota.go.id yang dikelola dan terkoneksi dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	90%	7097310568	96,13%	1.700.404.690	90	2.158.010.000	0	338.174.205	90	473.591.009					90	811.765.214	100.00	37.62	180	2.969.775.214	45	742.443.804
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	75	7097310568	75	1.700.404.690	75	2.158.010.000	75	338.174.205	75	473.591.009					150	811.765.214	200.00	37.62	225	2.969.775.214	56,25	742.443.804
																Rata- Rata Capaian Sub Kegiatan:			300.00	63.51				
																Predikat Capaian Sub Kegiatan:			Sangat Tinggi	Rendah				
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase aplikasi yang dikelola dan tersimpan di pusat data Pemerintah Daerah	85	6150903640	85	1.268.387.076	90	1.667.839.000	0	180.533.250	90	506.891.850					90	687.425.100	100.00	41.22	180	2.355.264.100	45	588.816.025
2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	1252056960	1	241.519.642	1	281.764.000	0	5.507.700	0	34.582.100					0	40.089.800	0.00	14.23	1	321.853.800	0,25	80.463.450
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1	2318848280	1	430.827.838	1	699.010.100	1	29.026.550	1	331.950.100					2	360.976.650	200.00	51.64	3	1.059.986.750	0,75	264.996.688

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Kota sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Kota sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kota Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun ...)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun (%)	
									I		II		III		IV									
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14											
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	3	1714710400	3	426.178.205	3	539.318.000	0	144.487.000	2	115.994.750					2	260.481.750	66.67	48.30	5	799.799.750	1,25	199.949.938
2.16.03.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1	293280000	1	60.846.400	1	15.807.000	0	1.512.000	1	0					1	1.512.000	100.00	9.57	2	17.319.000	0,5	4.329.750
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1	572008000	1	109.014.991	1	131.939.900	0	0	0	24.364.900					0	24.364.900	0.00	18.47	1	156.304.800	0,25	39.076.200
															Rata- Rata Capaian Sub Kegiatan:			93.33	45.45					
															Predikat Capaian Sub Kegiatan:			Sangat Tinggi	Sangat Rendah					
															Rata- Rata Capaian Kegiatan:			200.00	59.72					
															Predikat Capaian Kegiatan:			Sangat Tinggi	Rendah					
															Rata- Rata Capaian Program:			59.61	63.60					
															Predikat Capaian Program:			Rendah	Rendah					
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		2		2																			

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Kota sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Kota sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kota Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun ...)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun (%)	
									I		II		III		IV									
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14			
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki ketersediaan data statistik sesuai dengan prinsip satu data	37%	1032105456	37%	243.457.771	47	528.444.250	0	52.195.964	100	117.177.296					100	169.373.260	212.77	32.05	147	697.817.510	36,75	174.454.378
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan data statistik sektoral yang memenuhi standar data	250	1032105456	250	243.457.771	300	528.444.250	0	52.195.964	150	117.177.296					150	169.373.260	12.50	32.05	450	697.817.510	112,5	174.454.378
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	20	925787200	20	217.457.771	20	450.022.750	5	32.285.964	5	117.177.296					10	149.463.260	50.00	33.21	30	599.486.010	7,5	149.871.503
2.20.02.2.01.02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	45	106318256	45	26.000.000	60	78.421.500	2	19.910.000	58	0					60	19.910.000	100.00	25.39	120	98.331.500	30	24.582.875
															Rata- Rata Capaian Sub Kegiatan:			87.50	45.00					
															Predikat Capaian Sub Kegiatan:			Tinggi	Sangat Rendah					
															Rata- Rata Capaian Kegiatan:			20.83	58.79					
															Predikat Capaian Kegiatan:			Sangat Rendah	Rendah					

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Kota sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Kota sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kota Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun ...)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV									
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14			
														Rata- Rata Capaian Program:			425.53	58.79						
														Predikat Capaian Program:			Sangat Tinggi	Rendah						
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		351		409																			
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah	100,00%	1468625600	100%	398.910.045	50	628.510.000	0	297.800.250	100	67.432.000				100	365.232.250	200.00	58.11	150	993.742.250	37,5	248.435.563	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ASN yang telah menggunakan sertifikat elektronik	6	1468625600	40	326.850.620	4	413.460.000	0	89.683.250	40	62.392.000				40	152.075.250	1000.00	36.78	44	565.535.250	11	141.383.813	
2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10	358249600	1	101.897.700	2	170.660.000	0	46.598.250	1	15.490.000				1	62.088.250	50.00	36.38	3	232.748.250	0,75	58.187.063	
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	30	1110376000	15	224.952.920	20	242.800.000	20	43.085.000	30	46.902.000				50	89.987.000	250.00	37.06	70	332.787.000	17,5	83.196.750	
														Rata- Rata			250.00	76.76						

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Kota sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Kota sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kota Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun ...)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun (%)	
									I		II		III		IV								
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14										
													Capaian Sub Kegiatan:										
													Predikat Capaian Sub Kegiatan:			Sangat Tinggi	Tinggi						
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi	30	312832000		72.059.425	18	215.050.000	0	208.117.000	30	5.040.000				30	213.157.000	166.67	99.12	48	428.207.000	12	107.051.750
2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	20	312832000		72.059.425	5	215.050.000	30	208.117.000	30	5.040.000				60	213.157.000	1200.00	99.12	65	428.207.000	16,25	107.051.750
													Rata- Rata Capaian Sub Kegiatan:			1800.00	99.32						
													Predikat Capaian Sub Kegiatan:			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
													Rata- Rata Capaian Kegiatan:			1166.67	86.23						
													Predikat Capaian Kegiatan:			Sangat Tinggi	Tinggi						
													Rata- Rata Capaian Program:			400.00	82.10						
													Predikat Capaian Program:			Sangat Tinggi	Tinggi						

2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu-isu penting terkait urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi, sebagai berikut:

a. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang telah mulai diterapkan secara bertahap sejak tahun 2018. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

Misi SPBE adalah:

1. Melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu;
2. Mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas;
3. Membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal; dan
4. Membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Tujuan SPBE adalah:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan
3. Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.

Sasaran SPBE adalah:

1. Terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien;
2. Terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna;
3. Terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi; dan
4. Meningkatnya kapasitas SDM SPBE.

Menteri PANRB sebagai Ketua Tim Koordinasi bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan dan aktivitas SPBE Nasional,

mengkoordinasikan proses bisnis pemerintahan, menetapkan aplikasi umum serta menetapkan manajemen SDM, manajemen risiko dan manajemen perubahan. Dalam unsur-unsur SPBE, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bertanggung jawab pada perancangan dan pengimplementasian Arsitektur dan Peta Rencana SPBE pada domain Penyelenggaraan Pemerintahan, serta bertanggung jawab pada domain Layanan yang menyangkut urusan penyelenggaraan Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Layanan Publik Berbasis Elektronik.

Tingkat kematangan penyelenggaraan SPBE saat ini mencapai 4,02 melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya. Capaian ini menunjukkan penyelenggaraan SPBE berada pada tingkat kematangan baik.

Namun demikian terdapat beberapa permasalahan yang masih terjadi dan perlu diselesaikan untuk mengoptimalisasikan penyelenggaraan SPBE, antara lain:

Infrastruktur Teknologi

Infrastruktur teknologi masih belum memadai untuk mendukung SPBE, seperti kapasitas server yang tersedia, perangkat keras, dan perangkat lunak terkini.

Integrasi Sistem

Sistem Informasi yang digunakan belum sepenuhnya terintegrasi sehingga pertukaran data belum optimal.

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Keterbatasan SDM yang memiliki keterampilan dalam teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi hambatan besar dalam implementasi SPBE.

Keamanan Data

Serangan siber, menjadi tantangan serius dalam penerapan SPBE yang efektif dan aman.

b. Indeks Pembangunan Statistik

Statistik mempunyai arti penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional. Kegiatan statistik dituntut untuk menghasilkan statistik yang berkualitas, cepat, dan beragam sesuai kebutuhan pengguna. Oleh karena itu dibutuhkan pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik instansi pemerintah.

EPSS merupakan suatu penilain yang dilakukan oleh BPS secara sistematis melalui verifikasi dan validasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral meliputi:

- a. Pengukuran capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat maupun daerah.
- b. Peningkatan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat maupun daerah.
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada instansi pusat maupun daerah.

Keluaran EPSS adalah Indeks Pembangunan Statistik (IPS), merupakan suatu indikator yang menggambarkan tingkat kematangan statistik sektoral.

Untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Satu Data Indonesia merupakan kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

Pengaturan Satu Data Indonesia bertujuan:

1. Memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
2. Mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai

- dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
3. Mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
 4. Mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

Satu Data Indonesia harus dilakukan berdasarkan prinsip:

1. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
2. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
3. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
4. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Permasalahan-permasalahan dalam penyelenggaraan statistik sektoral meliputi:

Ketersediaan data prioritas

Data statistik sektoral prioritas belum tersedia secara lengkap, data yang tersedia seringkali tidak lengkap, tidak mutakhir, atau tidak relevan untuk mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan.

Belum optimalnya koordinasi antar pengelola Satu Data lingkup Kota

Lemahnya koordinasi antara pengelola satu data hal ini berpengaruh terhadap ketersediaan data sektoral.

Dari permasalahan-permasalahan strategis yang masih terjadi perlu dilakukan hal-hal berikut:

1. Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur TIK melalui pemeliharaan dan peningkatan kapasitas server, pemeliharaan perangkat aktif, penambahan bandwidth untuk optimalisasi digitalisasi layanan publik.
2. Secara bertahap melakukan interoperabilitas antar aplikasi melalui sistem penghubung layanan.

3. Meningkatkan kemandirian informasi baik melalui peningkatan SDM pengelola keamanan maupun penyediaan perangkat keamanan informasi.
4. Meningkatkan koordinasi antar lembaga pengelola data sektoral.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah:

TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Infrastruktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Arahan Pembangunan

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan kedepan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWACITA.

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tatakelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dari Visi, Misi dan Agenda pembangunan secara nasional keterkaitan yang mengarah pada Visi, Misi, tujuan dan sasaran yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Pada Tahun Anggaran 2023 kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi secara umum rata melebihi target dengan rata-rata capaian sebesar 126,65%. Pencapaian Kinerja ini dicapai dengan komitmen bersama yang kuat dan kerja keras seluruh elemen organisasi dari mulai pucuk pimpinan hingga lapisan paling bawah.

Dengan lompatan capaian kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2023 dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian terget pada tahun perencanaan 2025. Penyesuaian target untuk rencan kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi dilakukan dengan telaahan dan analisis terlebih dahulu melalui reviu Rencana Strategis Tahun 2023-2036. Penyesuian target dilakukan terhadap Indikator Kinerja Kunci dan Program sebagai berikut:

Hasil evaluasi terhadap capaian kinerja sasaran IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 dan rekomendasi dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Tahun 2023 terdapat beberapa capaian yang melampaui target bahkan melebihi target rencana tahun 2025, indikator kinerja utama yang telah melampaui target sebagai berikut:

Tabel 3.1. Perbandingan Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran							
				Pada Tahun Ke							
				2023		2024		2025		2026	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3.00	4,02	3.20		3.40		3.60	
2	Meningkatkan penyelenggaraan implementasi keterbukaan informasi publik	Meningkatnya penyelenggaraan implementasi keterbukaan informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	80%	90,48%	84%		88%		90%	
3	Mewujudkan data statistik sektoral daerah yang berkualitas	Terwujudnya data statistik sektoral daerah yang berkualitas	Indeks Pembangunan Statistik	2	2,53	3		3		4	
4	Meningkatkan keamanan sistem informasi pemerintah daerah	Meningkatnya keamanan sistem informasi pemerintah daerah	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	351	409	370		390		400	
5	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	55	78,71	55,5		56		56,5	

Berdasarkan capaian tersebut, maka perlu dilakukan penyesuain rencana target untuk tahun anggaran 2024 s.d. 2026 sebagai berikut:

Tabel 3.2 Perubahan Terget Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran							
				Pada Tahun Ke							
				2023		2024		2025		2026	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Meningkatkan Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3.00	4,02	4,10		4.15		4,2	
			Indeks Keterbukaan Informasi Publik	80%	90,48%	90,75%		90,90%		91,00%	
			Indeks Pembangunan Statistik	2	2,53	3		3,01		3,10	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran							
				Pada Tahun Ke							
				2023		2024		2025		2026	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
			Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	351	409	410		412		415	
			Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	55	86,93	86,96		86,98		89,00	

Selain perubahan IKU diskominfo, terdapat beberapa kinerja Program yang telah melampaui target pada tahun 2023 sehingga dilakukan penyesuaian target sebagai berikut:

Tabel 3.3 Perubahan Terget Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi

No	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET			
				2023	2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7
I	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatkan penyelenggaraan e-Government	Tingkat kematangan teknologi informasi dan Komunikasi (Nilai Indeks)	2,5	4,75	4,80	4,90
II	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatnya penyebaran informasi pembangunan daerah dan komunikasi publik yang efektif dan efisien	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	60	100	100	100
III	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Meningkatnya tata Kelola statistik sektoral daerah	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki ketersediaan data statistik sesuai	37	100	100	100

No	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET			
				2023	2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7
			dengan prinsip satu data				
IV	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah	33,33	100	100	100
V	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kinerja Organisasi	Nilai Sakip Perangkat Daerah	71	74,5	78	80
			Indeks Profesionalitas ASN	50	79,48	79,58	79,68
			Nilai IKM Perangkat Daerah	76,61	84,72	84,82	84,92

3.3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan dalam Perubahan

Untuk mendukung pelaksanaan dan implementasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang sesuai dengan perencanaan pada perubahan anggaran tahun 2024 diperlukan pendanaan sebagai berikut:

- Jumlah anggaran belanja pada rencana kerja murni tahun 2024 sebesar Rp. 15.861.391.470,-
- Jumlah anggaran belanja pada APBD Murni tahun 2023 sebesar Rp. 13.247.214.000,-
- Jumlah anggaran belanja pada APBD parsial Tahun 2023 sebesar Rp. nihil,-
- Jumlah sub kegiatan yang direncanakan ditunda pelaksanaannya pada Perubahan APBD Tahun 2023 sebanyak nihil sub kegiatan.
- Jumlah sub kegiatan yang baru muncul pada Perubahan APBD Tahun 2023 sebanyak nihil sub kegiatan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2024 memuat beberapa perubahan meliputi perubahan

indikator kinerja, target kinerja serta pagu indikatif yang dapat dilihat lebih rinci pada tabel berikut:

Tabel. 3.3. Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2024 Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Cimahi

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN		Target Indikator		Anggaran		
						Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan
1					2	3	4	5	6	7	8	9
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					15.861.391.470	15.563.592.238	-297.799.232
2	16	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip Pemerintah Daerah	Nilai Sakip Pemerintah Daerah	74,50 (BB)	74,50 (BB)	6.986.244.670	7.072.494.670	86.250.000
2	16	01				Indeks Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	50,50	79,48			
2	16	01				Nilai IKM Perangkat Daerah	Nilai IKM Perangkat Daerah	80,61	84,72			
2	16	01	2,01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun	100%	100%	125.402.000	98.822.000	-26.580.000
2	16	01	2,01	0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	2	2	73.935.000	49.755.000	-24.180.000
2	16	01	2,01	0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	16	16	51.467.000	49.067.000	-2.400.000
2	16	01	2,02		Kegiatan Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Keuangan Yang Disusun;	Jumlah Dokumen Keuangan Yang Disusun;	12	12	5.810.878.290	5.800.028.290	-10.850.000
2	16	01	2,02	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34	34	5.790.106.290	5.790.106.290	0
2	16	01	2,02	0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	18	18	20.772.000	9.922.000	-10.850.000
2	16	01	2,03		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Milik Daerah;	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Milik Daerah;	12	12	20.942.180	20.942.180	0
2	16	01	2,03	0002	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5	5	20.942.180	20.942.180	0
2	16	01	2,05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Yang terfasilitasi pelayanan administrasi kepegawaian	Persentase Pegawai Yang terfasilitasi pelayanan administrasi kepegawaian	100	100	31.010.000	169.142.000	138.132.000

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN		Target Indikator		Anggaran		
						Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan
1					2	3	4	5	6	7	8	9
2	16	01	2,05	0010	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40	40	31.010.000	169.142.000	138.132.000
2	16	01	2,06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12	12	294.141.000	284.659.000	-9.482.000
2	16	01	2,06	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	3	63.382.000	48.776.000	-14.606.000
2	16	01	2,06	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40	40	39.374.000	44.498.000	5.124.000
2	16	01	2,06	0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15	15	16.526.000	16.526.000	0
2	16	01	2,06	0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	60	174.859.000	174.859.000	0
2	16	01	2,08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12	12	154.191.000	147.811.000	-6.380.000
2	16	01	2,08	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16	16	91.180.000	91.180.000	0
2	16	01	2,08	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	16	16	3.800.000	1.900.000	-1.900.000
2	16	01	2,08	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16	16	59.211.000	54.731.000	-4.480.000
2	16	01	2,09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah bulan pemeliharaan barang milik daerah	12	12	549.680.200	551.090.200	1.410.000

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN		Target Indikator		Anggaran		
						Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan
1					2	3	4	5	6	7	8	9
2	16	01	2,09	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	5	150.148.000	148.148.000	-2.000.000
2	16	01	2,09	0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	381.572.200	381.572.200	0
2	16	01	2,09	0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18	18	17.960.000	21.370.000	3.410.000
2	16	02			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	65%	100%	3.892.343.550	3.674.626.550	-217.717.000
2	16	02	2,01		Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase analisis berita yang konten positif	Persentase analisis berita yang konten positif	84%	84%	3.892.343.550	3.674.626.550	-217.717.000
2	16	02	2,01	0005	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12	12	229.223.850	181.380.850	-47.843.000
2	16	02	2,01	0006	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12	12	856.335.000	848.057.000	-8.278.000
2	16	02	2,01	0007	Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	10	10	2.806.784.700	2.645.188.700,00	-161.596.000
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Tingkat Kematangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Nilai Indeks)	Tingkat Kematangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Nilai Indeks)	2,75	4,75	3.825.849.000	3.788.552.000	-37.297.000

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN		Target Indikator		Anggaran		
						Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan
1					2	3	4	5	6	7	8	9
2	16	03	2,01		Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang menggunakan sub domain cimahikota.go.id yang dikelola dan terkoneksi dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase perangkat daerah yang menggunakan sub domain cimahikota.go.id yang dikelola dan terkoneksi dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	90%	90%	2.158.010.000	2.115.475.000	-42.535.000
2	16	03	2,01	0003	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	75	75	2.158.010.000	2.115.475.000,00	-42.535.000
2	16	03	2,02		Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase aplikasi yang dikelola dan tersimpan di pusat data Pemerintah Daerah	Persentase aplikasi yang dikelola dan tersimpan di pusat data Pemerintah Daerah	90%	90%	1.667.839.000	1.673.077.000	5.238.000
2	16	03	2,02	0001	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E -Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E -Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1	1	281.764.000	296.508.000,00	14.744.000
2	16	03	2,02	0003	Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1	1	699.010.100	699.010.100	0
2	16	03	2,02	0007	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	3	3	539.318.000	564.676.000,00	25.358.000
2	16	03	2,02	0008	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1	1	15.807.000	10.407.000	-5.400.000
2	16	03	2,02	0009	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1	1	131.939.900	102.475.900,00	-29.464.000
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					528.444.250	459.233.018	-69.211.232

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN		Target Indikator		Anggaran		
						Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan
1					2	3	4	5	6	7	8	9
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki ketersediaan data statistik sesuai dengan prinsip satu data	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki ketersediaan data statistik sesuai dengan prinsip satu data	47%	100%	528.444.250	459.233.018	-69.211.232
2	20	02	2,01		Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan data statistik sektoral yang memenuhi standar data	Jumlah ketersediaan data statistik sektoral yang memenuhi standar data	300	300	528.444.250	459.233.018	-69.211.232
2	20	02	2,01	0001	<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral</i>	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	20	20	450.022.750	380.811.518,00	-69.211.232
2	20	02	2,01	0002	<i>Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi</i>	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	60	60	78.421.500	78.421.500	0
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					628.510.000	568.686.000	-59.824.000
2	21				PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah	50,00%	100,00%	628.510.000	568.686.000	-59.824.000
2	21	02	2,01		Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ASN yang telah menggunakan sertifikat elektronik	Persentase ASN yang telah menggunakan sertifikat elektronik	4%	40%	413.460.000	353.636.000	-59.824.000
2	21	02	2,01	0002	<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	2	2	170.660.000	170.660.000,00	0
2	21	02	2,01	0004	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	20	30	242.800.000	182.976.000	-59.824.000

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN		Target Indikator		Anggaran		
						Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan
1					2	3	4	5	6	7	8	9
2	21	02	2,02		Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi;	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi;	18	18	215.050.000	215.050.000	0
2	21	02	2,02	0001	Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	5	30	215.050.000	215.050.000	0
Jumlah										15.861.391.470	15.563.592.238	-297.799.232

BAB IV PENUTUP

Rata-rata capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi sampai dengan triwulan II tahun 2024 sebesar 49,79% sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.640.844.565 dari total anggaran Rp. 15.861.391.470 atau 41,87% anggaran sudah dibelanjakan untuk mendukung kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika. Anggaran perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika mengalami penurunan dari Rp. 15.861.391.470 sebesar Rp. 297.799.232 menjadi Rp. 15.563.592.238.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi tahun 2023-2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Cimahi serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja ini akan dijadikan sebagai pedoman bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi dalam menjalankan tugas dan fungsi SKPD serta sebagai acuan dalam menyusun program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi tahun 2024, terutama dalam rencana pencapaian kinerja.

Pelaksanaan rencana kerja sebagaimana tercantum dalam BAB III dapat dilaksanakan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dengan asumsi penyediaan dana sesuai dengan yang diperkirakan. Rencana target kinerja dan anggaran belum mempertimbangkan aspek ketersediaan dana Pemerintah Daerah Kota Cimahi dan kebijakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

Cimahi, 2024


**KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
KOTA CIMAHI**

HENDRA GUNAWAN, S.Sos., M.I.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720301 199203 1 012

**Cascading Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi
Tahun 2024**

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja
Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Meningkatnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik			Indeks SPBE	Indeks	3,00
			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		Tingkat Kematangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Nilai Indeks)	Nilai Indeks	2,50
				Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang menggunakan sub domain cimahikota.go.id yang dikelola dan terkoneksi dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persen	90%
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	75
				Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase aplikasi yang dikelola dan tersimpan di pusat data Pemerintah Daerah	Persen	85
				Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E -Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	1
				Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit	3
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Layanan	1
				Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Dokumen	1
	Meningkatkan penyelenggaraan implementasi keterbukaan informasi publik	Meningkatnya penyelenggaraan implementasi keterbukaan informasi publik			Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Persen	80%
			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	60%
				Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase analisis berita yang berkonten positif		82%
				Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	12
				Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	12
				Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Layanan	10

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja
	Mewujudkan data statistik eektoral daerah yang berkualitas	Terwujudnya data statistik sektoral daerah yang berkualitas			Indeks Pembangunan Statistik	Level (Tingkat Kematangan)	2
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Persentase Perangkat Daerah yang memiliki ketersediaan data statistik sesuai dengan prinsip satu data	Persen	37%
				Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan data statistik sektoral yang memenuhi standar data	Data Set	250
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen	20
				Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Orang	45
	Meningkatkan keamanan sistem informasi pemerintah daerah	Meningkatnya keamanan sistem informasi pemerintah daerah			Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Indeks	351
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah	Persen	33,33%
				Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ASN yang telah menggunakan sertifikat elektronik	Persen	3
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1
				Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	15
				Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi;	Persen	10
				Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah	1
	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan			Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		
			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Nilai Sakip Pemerintah Daerah	Nilai Angka	71 (BB)
					Indeks Profesionalitas ASN	Nilai Angka	50,00
					Nilai IKM Perangkat Daerah	Nilai Angka	76,61
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun	Persen	100%
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	2
				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	16
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Milik Daerah;		12
				Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	5

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan	12
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	40
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	15
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	50
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan	12
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	16
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	16
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	16
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan barang milik daerah	Bulan	12
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5
				Sub Kegiatan Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	15
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Yang terfasilitasi pelayanan administrasi kepegawaian	Persen	100
				Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	40
				Kegiatan Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Keuangan Yang Disusun;	Dokumen	12
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	34
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	18


 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA CIMAHI
HENDRA GUNAWAN, S.Sos., M.I.P.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19720301 199203 1 012

CROSCUTTING SASARAN IKU



SEKRETARIS

1. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
2. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

KADISKOMINFO

1. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
2. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

KEPALA BIDANG INFORMASI KOMUNIKASI PUBLIKASI STATITIKA

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
2. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

KEPALA BIDANG E-GOVERNMENT

1. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

